



Pendidikan Islam di Era Abu Ja'far Al-Mansur: Dari Politik Menuju Keilmuan

Salsabila Khairani¹, Fatimah Al-Jahra², Mahfud Ifendi³

^{1,2,3}STAI Sangatta Kutai Timur, Indonesia

Email : salsabilakhairani444@gmail.com¹, faatimahaljahra1@gmail.com²,
mahfudzifindi@gmail.com³

Diserahkan tanggal 28 Mei 2025 | Diterima tanggal 22 Juli 2025 | Diterbitkan tanggal 12 Agustus 2025

Abstract:

This article aims to examine the strategic role of Caliph Abu Ja'far al-Mansur in shaping the foundations of Islamic education during the early Abbasid dynasty. The focus of this research is to explore how the political stability built by al-Mansur led to the advancement of Islamic science and education. This research uses a descriptive qualitative method with a historical approach, through a literature study of historical documents, biographies of figures, and relevant scientific literature. Data collection techniques were conducted through literature review, and the data were analyzed narratively and contextually. The results showed that Abu Ja'far al-Mansur played an important role in strengthening the Islamic education system through the development of the city of Baghdad as a center of science, empowering traditional institutions such as mosques, kuttab, and halaqah, as well as initiating a movement to translate foreign works into Arabic. He also opened up space for the participation of non-Arabs (mawali) in intellectual activities and began to build an administrative system that supported education and learning. This finding confirms that the era of al-Mansur was the initial period of the formation of an Islamic education system that was inclusive, dynamic, and became the basis for scientific development in the following period.

Keywords: Islamic education, Abu Ja'far al Mansur, Science

Abstrak :

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dalam membentuk fondasi pendidikan Islam pada masa awal Dinasti Abbasiyah. Fokus penelitian ini adalah menelusuri bagaimana stabilitas politik yang dibangun al-Mansur mengarah pada kemajuan keilmuan dan pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan historis, melalui studi pustaka terhadap dokumen sejarah, biografi tokoh, serta literatur ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur, dan data dianalisis secara naratif dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Abu Ja'far al-Mansur memainkan peran penting dalam penguatan sistem pendidikan Islam melalui pembangunan kota Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan, pemberdayaan lembaga-lembaga tradisional seperti masjid, kuttab, dan halaqah, serta inisiasi gerakan penerjemahan karya-karya asing ke dalam bahasa Arab. Ia juga membuka ruang partisipasi bagi kalangan non-Arab (mawali) dalam kegiatan intelektual serta mulai membangun sistem administrasi yang mendukung pendidikan dan pembelajaran. Temuan ini menegaskan bahwa era al-Mansur merupakan periode awal terbentuknya sistem pendidikan Islam yang bersifat inklusif, dinamis, dan menjadi dasar bagi perkembangan keilmuan pada masa berikutnya.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Abu Ja'far al-Mansur, Keilmuan

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Pendidikan Islam merupakan aspek fundamental dalam perkembangan peradaban Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW Ketika masih di Makkah (Ifendi, 2020b) dan Madinah (Ifendi, 2021b) hingga periode kekhalifahan Islam. Salah satu periode penting dalam sejarah perkembangan pendidikan Islam terjadi pada masa kekuasaan Dinasti Abbasiyah, khususnya di bawah pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur (754–775 M) (Jahra et al., 2025). Masa ini dikenal sebagai titik awal perubahan besar dalam orientasi pendidikan Islam, dari yang sebelumnya bersifat tradisional dan keagamaan semata menjadi lebih terbuka terhadap ilmu-ilmu rasional. Pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur menjadi fondasi awal bagi terciptanya iklim keilmuan yang matang dalam sejarah Islam klasik (Nelly, 2024).

Dalam konteks kekhalifahan Abbasiyah, Abu Ja'far al-Mansur dikenal sebagai sosok pemimpin yang tidak hanya berorientasi pada perluasan wilayah dan kekuasaan politik, tetapi juga pada pembangunan intelektual umat Islam. Sebagai khalifah kedua dari Bani Abbasiyah, ia memiliki visi untuk menjadikan kekuasaannya bukan sekadar simbol politik, tetapi juga pusat ilmu pengetahuan. Strategi tersebut ditunjukkan melalui pembangunan kota Baghdad sebagai ibu kota kekhalifahan sekaligus pusat kegiatan ilmiah yang menghubungkan Timur dan Barat (Ibrahim, 2021).

Fenomena menarik terjadi pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur, ketika seorang khalifah yang dikenal militan dalam urusan politik justru mengambil peran besar dalam mengarahkan pendidikan Islam menuju pendekatan yang lebih rasional dan ilmiah. Transformasi ini mencerminkan pergeseran ideologis dalam praktik kekuasaan, di mana ilmu pengetahuan dimanfaatkan tidak hanya sebagai alat legitimasi kekuasaan, tetapi juga sebagai fondasi peradaban. Dalam konteks sosial-politik, al-Mansur menjalin hubungan erat dengan para ulama dan cendekiawan, memberikan dukungan penuh terhadap aktivitas intelektual, termasuk mendorong penerjemahan karya-karya ilmiah dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Ia juga memulai langkah awal pendirian institusi seperti Bait al-Hikmah yang menjadi simbol integrasi antara kekuasaan dan ilmu pengetahuan. Dukungan terhadap pengembangan ilmu rasional ini memperlihatkan bahwa al-Mansur memposisikan ilmu sebagai unsur strategis dalam memperkuat stabilitas negara dan memperluas otoritas kultural kekhalifahan Abbasiyah (Daulay et al., 2021).

Di sisi lain, gejala ini juga menunjukkan adanya kerjasama antara kekuasaan politik dan otoritas intelektual. Ulama, ilmuwan, dan penerjemah mendapatkan posisi yang strategis dalam pemerintahan al-Mansur. Mereka diberi ruang untuk mengembangkan gagasan-gagasan ilmiah, menerjemahkan karya-karya Yunani, Persia, dan India, serta menyusun sistem pendidikan yang lebih terorganisir. Fenomena ini tentu berbeda dari masa-masa sebelumnya di mana pengajaran agama lebih bersifat informal melalui halaqah di masjid (M. Abdul Karim, 2009).

Untuk menjelaskan fenomena tersebut secara teoritis, dapat digunakan teori *korelasi antara kekuasaan dan produksi pengetahuan* dalam studi sosiologi pendidikan. Menurut teori ini, institusi kekuasaan yang stabil dan mendukung akan menghasilkan iklim ilmiah yang subur. Michel Foucault bahkan mengaitkan pengetahuan dengan kekuasaan (power/knowledge), di mana pengetahuan tidak netral, melainkan diproduksi oleh dan untuk kepentingan kekuasaan tertentu (Pratama, 2021). Dalam konteks Abu Ja'far, dapat diasumsikan bahwa kebijakan keilmuan adalah bagian dari strategi untuk membentuk legitimasi budaya dan spiritual.

Selain itu, pendekatan sejarah intelektual Islam seperti yang dikemukakan oleh (Rosenthal, 1970) dalam *Knowledge Triumphant* dapat digunakan untuk memahami makna ilmu sebagai instrumen spiritual dan sosial dalam Islam. Dalam sejarah Islam, ilmu memiliki kedudukan tinggi, dan penguasa yang mencintai ilmu sering kali dipandang lebih adil dan saleh. Abu Ja'far al-Mansur tampaknya menyadari fenomena ini dan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam kebijakan pendidikannya.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini antara lain dilakukan oleh (Gutas, 1998) dalam karyanya *Greek Thought, Arabic Culture*, yang menyoroti peran awal Khalifah

Abbasiyah, termasuk Abu Ja'far, dalam menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani. Gutas menyebut era Abu Ja'far sebagai fondasi bagi gerakan penerjemahan besar yang mencapai puncaknya pada masa al-Ma'mun. Penelitian lain oleh (Kennedy, 2015) dalam *The Prophet and the Age of the Caliphates* juga menekankan bagaimana peran politik al-Mansur berdampak pada pembentukan budaya ilmiah di Baghdad.

Meski demikian, kajian yang secara khusus menghubungkan transformasi dari orientasi politik menuju orientasi keilmuan dalam pendidikan Islam pada era Abu Ja'far masih jarang ditemukan. Sebagian besar studi hanya menyentuh aspek sejarah politik atau biografi tokoh, tanpa mengelaborasi secara sistematis hubungan antara kebijakan kekuasaan dengan sistem pendidikan Islam yang berkembang saat itu. Maka penting untuk melakukan studi lebih lanjut mengenai pendidikan Islam di masa Abu Ja'far al-Mansur dengan perspektif interdisipliner yang mencakup sejarah pendidikan, sosiologi kekuasaan, dan studi keilmuan Islam. Fenomena ini bertujuan untuk memahami bahwa pendidikan Islam bukan entitas yang terpisah dari konteks kekuasaan, melainkan saling berkelindan membentuk struktur peradaban Islam klasik (Wijaya et al., 2025).

Urgensi penelitian ini juga terletak pada pentingnya menggali kembali nilai-nilai pendidikan dari masa klasik Islam sebagai refleksi bagi pengembangan sistem pendidikan Islam kontemporer. Di tengah tantangan modernitas dan krisis epistemologi di dunia Islam saat ini, pelajaran dari masa Abu Ja'far dapat dijadikan inspirasi untuk membangun pendidikan Islam yang kuat secara intelektual dan kokoh secara institusional. Selain itu, analisis terhadap kebijakan Abu Ja'far al-Mansur menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak boleh hanya berorientasi pada aspek ritualistik dan normatif, tetapi juga harus terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan universal. Pendekatan integratif antara ilmu agama dan ilmu rasional, seperti yang dicontohkan pada masa itu, dapat menjadi model pendidikan Islam yang ideal di era modern (Daulay et al., 2021).

Penelitian ini juga penting dalam konteks historis sebagai upaya meluruskan pemahaman bahwa pendidikan Islam bersifat tertutup dan tradisional. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pendidikan Islam justru mengalami kemajuan signifikan ketika terbuka terhadap dialog ilmu dan budaya dari peradaban lain. Abu Ja'far al-Mansur adalah salah satu tokoh kunci yang memelopori keterbukaan ini. Dengan memahami transformasi pendidikan Islam dari orientasi politik ke orientasi keilmuan pada era Abu Ja'far, kita juga dapat melihat bagaimana kekuasaan dapat menjadi alat yang produktif bagi pengembangan intelektual. Dalam konteks Indonesia, di mana relasi antara agama dan negara masih menjadi perdebatan, kajian ini menawarkan wacana baru tentang pentingnya sinergi antara kepemimpinan politik dan penguatan lembaga pendidikan Islam (Ichsan et al., 2023).

Secara metodologis, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui kajian literatur dan analisis historis. Data akan dikumpulkan dari sumber primer seperti karya-karya sejarah klasik (Tarikh at-Thabari, Al-Mas'udi, dan lainnya), serta sumber sekunder dari literatur akademik modern yang relevan (Syuja, 2020). Lewat tulisan ini, penulis ingin menggali lebih dalam bagaimana pendidikan Islam di era Abu Ja'far al-Mansur mengalami transformasi besar akibat kebijakan politik dan arah kebudayaan yang ditempuh oleh sang khalifah. Harapannya, pembaca bisa melihat bahwa kebangkitan keilmuan Islam bukanlah proses kebetulan, melainkan buah dari visi kepemimpinan yang sadar akan nilai pengetahuan.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih terfokus peran dan kebijakan Abu Ja'far al-Mansur dalam membentuk arah pendidikan Islam pada masa awal kekuasaan Abbasiyah, dengan menelaah beberapa aspek utama yang mencerminkan orientasi keilmuannya. Kajian ini mencakup analisis terhadap pendirian lembaga-lembaga keilmuan sebagai fondasi sistem pendidikan, dukungan aktif terhadap gerakan penerjemahan karya-karya Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab, pengaruhnya dalam pembentukan kurikulum berbasis ilmu rasional, serta bentuk relasi yang dibangun antara penguasa dan para ilmuwan dalam struktur pemerintahan. Melalui pendekatan historis-kritis, artikel ini dimaksudkan untuk menelusuri bagaimana kekuasaan

dimanfaatkan tidak hanya sebagai alat kontrol politik, melainkan juga sebagai medium strategis dalam membangun otoritas intelektual yang menopang perkembangan pendidikan Islam secara lebih terstruktur dan visioner (Faiz Fikri Al Fahmi, Annisa'ul Fadillah, Retno Pujiastuti, Ahmad Pauji, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis untuk mengkaji kebijakan pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) terhadap sumber-sumber primer seperti karya sejarah klasik (Tarikh at-Thabari, Al-Mas'udi) dan sumber sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Data dianalisis melalui tiga tahapan: kritik sumber, interpretasi kontekstual, dan penyusunan narasi historiografis. Pendekatan ini mengacu pada prinsip sejarah ilmiah menurut (Gottschalk, 1985) dan (Kuntowijoyo, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Abu Ja'far al-Mansur

Abu Ja'far al-Mansur, dengan nama lengkap Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, adalah khalifah kedua dari Dinasti Abbasiyah dan merupakan tokoh sentral dalam mengokohkan kekuasaan Abbasiyah pasca-runtuhnya Dinasti Umayyah. Ia lahir pada tahun 95 H / 714 M di al-Humaymah, sebuah desa kecil di wilayah Yordania saat ini. Ia berasal dari garis keturunan al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad saw. yang menjadi dasar klaim legitimasi kekuasaan keluarga Abbasiyah atas umat Islam. Ibunya berasal dari bangsa Barbar (*Amazigh*) Afrika Utara, yang menunjukkan keberagaman etnis dalam keluarga elite Abbasiyah. Lingkungan keluarganya sejak dini telah dibentuk oleh suasana perjuangan politik rahasia dan semangat revolusi melawan Bani Umayyah, yang saat itu memegang tampuk kekuasaan kekhalifahan Islam (Maulidyana, 2017).

Sejak masa kecilnya, Abu Ja'far tumbuh dalam keluarga yang penuh dengan cita-cita dan perencanaan jangka panjang untuk mengambil alih kekuasaan Islam. Ayahnya, Muhammad bin Ali, adalah tokoh penting dalam jaringan bawah tanah gerakan Abbasiyah yang menggalang dukungan dari berbagai kalangan, khususnya dari wilayah Khurasan yang jauh dari pusat kekuasaan Umayyah dan berisi banyak Muslim non-Arab yang merasa terpinggirkan. Dalam suasana ini, Abu Ja'far mendapatkan pendidikan yang mencakup ilmu-ilmu dasar agama Islam, bahasa Arab, hafalan Al-Qur'an, serta pemahaman politik. Ia pun banyak menyaksikan diskusi dan strategi perjuangan keluarga Abbasiyah, yang menjadi fondasi penting dalam pembentukan watak dan kecerdasannya kelak (Sormin et al., 2024).

Peran Abu Ja'far mulai terlihat signifikan ketika gerakan Abbasiyah mulai menampakkan keberhasilan. Ia bersama saudaranya, Abu al-'Abbas as-Saffah, ikut dalam gerakan penggalangan kekuatan militer dan politik yang dipusatkan di Khurasan. Ketika revolusi berhasil dan Bani Umayyah berhasil digulingkan dalam Pertempuran Zab tahun 750 M, Abu al-'Abbas diangkat menjadi khalifah pertama Dinasti Abbasiyah. Dalam masa pemerintahan saudaranya, Abu Ja'far dipercaya untuk menjalankan berbagai tugas kenegaraan, termasuk memimpin pasukan dan mengawasi urusan dalam negeri. Ia terbukti sebagai administrator yang tangguh dan negarawan yang penuh perhitungan (Juli et al., 2025).

Ketika Abu al-'Abbas wafat pada tahun 136 H / 754 M, Abu Ja'far al-Mansur diangkat sebagai khalifah kedua Abbasiyah. Masa awal pemerintahannya diwarnai dinamika internal, terutama perebutan kekuasaan yang melibatkan kerabat dekat. Dalam situasi ini, al-Mansur menunjukkan ketegasan dan strategi politik yang matang dengan mengonsolidasikan kekuasaan secara bertahap, termasuk mengatasi pengaruh besar Abu Muslim al-Khurasani yang semula menjadi sekutu penting. Tindakan-tindakannya dalam mengamankan posisi

politik bukan semata bentuk kekerasan, melainkan bagian dari upaya membangun fondasi pemerintahan yang stabil dan sentralistik. Stabilitas ini menjadi titik tolak bagi al-Mansur untuk memulai proses pembenahan struktural dalam sistem administrasi dan perencanaan pembangunan kota baru yang mencerminkan visi besar kekhalifahan Abbasiyah. (Daulay et al., 2021).

Setelah mengamankan posisi politiknya, Abu Ja'far al-Mansur mulai membangun fondasi negara Abbasiyah secara sistematis. Ia menata ulang sistem administrasi, keuangan, dan militer agar lebih efisien dan profesional. Ia memindahkan ibu kota dari Kufa ke kota yang ia bangun sendiri, yaitu Baghdad, yang peletakan batu pertamanya dilakukan pada tahun 145 H / 762 M. Kota ini dibangun dengan desain melingkar yang inovatif dan dirancang menjadi pusat pemerintahan dan peradaban. Baghdad kemudian berkembang menjadi salah satu kota terbesar dan termakmur di dunia Islam, menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan perdagangan selama berabad-abad (Yurika Prastika, 2024).

Dalam bidang keilmuan, al-Mansur sangat berjasa karena mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan penerjemahan karya-karya klasik. Ia mulai mengirim utusan untuk mencari manuskrip dari peradaban Yunani, Persia, dan India, lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Proyek ini menjadi fondasi dari gerakan penerjemahan besar-besaran yang memuncak pada masa Harun ar-Rasyid dan al-Ma'mun. Selain itu, ia juga mendukung para ilmuwan dan ulama untuk berkembang di Baghdad, menjadikannya pusat pembelajaran yang disegani. Meskipun al-Mansur sendiri lebih dikenal sebagai sosok pragmatis dan politis daripada intelektual, namun kebijakan-kebijakan strategisnya membuka jalan bagi lahirnya peradaban Islam klasik (Harimurti, 2015).

Namun, pemerintahannya juga diwarnai dengan kekerasan dan tekanan terhadap berbagai kelompok yang dianggap membahayakan kekuasaan Abbasiyah. Ia melakukan penindasan terhadap kelompok Alawiyin, yaitu keturunan Ali bin Abi Thalib, yang merasa dikhianati setelah mendukung revolusi Abbasiyah. Beberapa tokoh Alawiyin seperti Muhammad an-Nafs az-Zakiyah bahkan melakukan pemberontakan, namun berhasil ditumpas dengan kekuatan militer. Tindakan ini memperlihatkan bahwa al-Mansur bersikap tanpa kompromi terhadap ancaman terhadap stabilitas kekhalifahan, meskipun harus mengorbankan hubungan dengan kalangan yang memiliki hubungan darah dengan Nabi Muhammad saw (Hasibuan et al., 2022).

Sikapnya yang keras dan penuh perhitungan membuatnya dijuluki sebagai al-Mansur ad-Dawlah (yang dimenangkan oleh negara), namun juga dicap sebagai penguasa otoriter oleh sebagian pihak. Ia memerintah dengan tangan besi, namun berhasil membawa stabilitas dan kemajuan administratif yang luar biasa. Dalam banyak catatan sejarah, al-Mansur digambarkan sebagai pribadi yang hemat, cermat, dan sangat berhati-hati dalam menggunakan kekuasaan. Ia tidak dikenal sebagai pemimpin yang flamboyan atau bermegah-megahan, melainkan lebih dikenal karena visi strategisnya terhadap pemerintahan yang efisien dan tahan lama. (Ahmad Choirul Rafiq, 2017)

Abu Ja'far al-Mansur wafat pada tahun 158 H / 775 M saat sedang dalam perjalanan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Ia meninggal di sebuah tempat bernama Bir Ma'un, dekat tanah suci, dan dimakamkan di sana. Sepeninggalnya, kekhalifahan Abbasiyah dilanjutkan oleh putranya, al-Mahdi, yang mewarisi sebuah kekuasaan yang telah stabil, mapan, dan dihormati oleh dunia Islam. **Sebagian** sejarawan menilai bahwa al-Mansur merupakan khalifah besar yang bukan hanya berhasil mempertahankan kekuasaan, tetapi juga meletakkan fondasi kokoh bagi lahirnya zaman keemasan Islam yang berlangsung pada abad-abad berikutnya (Maulidyana, 2017).

Abu Ja'far al-Mansur adalah tokoh visioner yang memainkan peran ganda: sebagai pengokoh politik dinasti Abbasiyah dan sebagai arsitek peradaban Islam klasik. Kebijakan-kebijakannya, meskipun kontroversial, telah membentuk arah sejarah dunia Islam dalam

bidang pemerintahan, kota, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Ia adalah simbol dari awal transisi kekuasaan Abbasiyah dari sebuah gerakan revolusioner menuju sebuah imperium yang kuat dan terorganisir, menjadikan Baghdad sebagai jantung peradaban Islam selama ratusan tahun. Warisannya tetap hidup dalam sejarah dan peradaban umat Islam hingga kini (Rizvi et al., 2024).

2. Kondisi Sosial Politik Pada Masa Abu Ja'far al-Mansur

Pada masa kekuasaan Abu Ja'far al-Mansur (754 – 775 M), kondisi sosial dan politik dunia Islam berada dalam fase transisi dan konsolidasi. (Amiruddin Dardiri et al., 2023) Setelah revolusi besar yang menggulingkan Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah masih harus menghadapi ketegangan politik yang tinggi akibat perubahan rezim. Sebagai khalifah kedua Abbasiyah, al-Mansur mewarisi kekuasaan dari saudaranya, Abu al-'Abbas as-Saffah, di tengah suasana politik yang belum stabil dan penuh dengan potensi pemberontakan, baik dari dalam internal keluarga Abbasiyah maupun dari kelompok-kelompok lain yang merasa dikhianati oleh revolusi tersebut, seperti keturunan Alawiyin (keluarga Ali bin Abi Thalib) yang merasa dijanjikan kekuasaan, kelompok Syiah yang berharap kekhalifahan akan diberikan kepada Imam dari Ahlul Bait, serta sebagian unsur Khurasan yang merasa jasanya dalam revolusi tidak dihargai. (Andy Riski Pratama et al., 2023).

Secara politik, masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur ditandai oleh upaya kuat dalam konsolidasi kekuasaan. Ia menghadapi ancaman dari pihak keluarga sendiri, seperti pamannya Abdullah bin Ali yang mengklaim hak atas kekhalifahan, serta dari sekutu lama seperti Abu Muslim al-Khurasani, tokoh penting dalam keberhasilan revolusi Abbasiyah. Abu Muslim yang sangat berpengaruh di wilayah Khurasan dianggap sebagai ancaman serius terhadap otoritas pusat, sehingga pada akhirnya al-Mansur memerintahkan pembunuhannya. Selain itu, berbagai kelompok keturunan Ali bin Abi Thalib (Alawiyin) juga melakukan perlawanan, seperti pemberontakan Muhammad an-Nafs az-Zakiyah, yang berhasil ditumpas. Semua ini menunjukkan betapa berbahayanya suasana politik saat itu dan bagaimana al-Mansur menerapkan kekuasaan yang keras demi stabilitas (Ummah, 2020).

Dalam bidang sosial, al-Mansur mewarisi masyarakat yang majemuk secara etnis dan budaya. Penduduk kekhalifahan terdiri dari Arab, Persia, Turki, Kurdi, serta berbagai suku dan bangsa non-Arab lainnya yang sebelumnya hidup di bawah hegemoni Arab Umayyah. Banyak dari kalangan non-Arab yang mendukung revolusi Abbasiyah dengan harapan akan mendapatkan keadilan sosial dan peran lebih besar dalam pemerintahan. Al-Mansur berusaha menyeimbangkan dinamika sosial ini dengan membuka peluang bagi orang-orang Persia dan Mawali (non-Arab yang masuk Islam) untuk terlibat dalam birokrasi, terutama dalam administrasi dan ilmu pengetahuan. Namun demikian, ketegangan sosial antara kelompok Arab tradisional dan kelompok Mawali masih tetap terasa dalam beberapa lapisan masyarakat (Rizvi et al., 2024).

Sebagai seorang pemimpin yang dikenal hemat, tegas, dan sangat berhati-hati, al-Mansur membentuk pemerintahan yang lebih birokratis dan terorganisir dibandingkan masa Umayyah. Ia membangun sistem administrasi negara yang rapi dan memperkuat otoritas pusat. Salah satu langkah pentingnya adalah mendirikan kota Baghdad pada tahun 762 M sebagai ibu kota baru yang menjadi simbol kebesaran Abbasiyah. Baghdad dibangun dengan konsep kota administratif sekaligus pusat ilmu dan perdagangan. Pendirian kota ini bukan hanya keputusan geografis, melainkan juga politik: al-Mansur ingin memindahkan pusat kekuasaan dari lingkungan lama Kufa yang penuh dengan konflik ke tempat baru yang bisa dikendalikan lebih efektif (Dari & Roza, 2023).

Dari segi hubungan sosial-keagamaan, al-Mansur mendukung pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta memulai upaya penerjemahan teks-teks asing ke dalam bahasa Arab, khususnya dalam bidang ilmu kedokteran dan filsafat. Meskipun demikian, ia juga dikenal sebagai penguasa yang mengontrol ketat kelompok keagamaan yang dianggap menyimpang

atau membahayakan stabilitas politik. Ulama yang mendekati kekuasaan diberi tempat, namun mereka yang vokal terhadap pemerintah bisa ditindas. Al-Mansur juga berupaya memperkuat posisi Sunni sebagai mazhab resmi negara dan menekan kelompok Syiah yang dianggap menentang pemerintahan Abbasiyah secara ideologis dan politis (Nurcahya et al., 2025).

Masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur adalah periode penting dalam membentuk struktur sosial dan politik Dinasti Abbasiyah yang stabil dan kuat. Ia berhasil mengatasi tantangan politik internal yang besar dan membangun fondasi negara yang tangguh. Meskipun pemerintahannya sering disebut otoriter dan keras terhadap lawan politik, banyak sejarawan sepakat bahwa al-Mansur adalah arsitek penting dari sistem pemerintahan Abbasiyah yang mampu bertahan selama berabad-abad dan membawa dunia Islam menuju masa keemasannya (M. Ikhwan, 2022).

3. Kebijakan Pemerintah yang Mendukung Pendidikan Pada Masa Abu Ja'far al-Mansur

Pada masa kekuasaan Abu Ja'far al-Mansur (754–775 M), Dinasti Abbasiyah mulai menunjukkan perhatian besar terhadap pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari strategi pemerintahan dan peradaban. Meskipun fokus utama pemerintahannya adalah konsolidasi politik dan penguatan kekuasaan, al-Mansur juga menyadari pentingnya ilmu pengetahuan bagi kemajuan negara. Ia menjadi salah satu khalifah awal yang memberi dukungan nyata terhadap pendidikan, terutama dengan mendirikan pusat-pusat pembelajaran dan mendorong kegiatan intelektual. Langkah-langkahnya kelak menjadi dasar dari kejayaan ilmiah yang akan mewarnai masa keemasan Islam di bawah Abbasiyah (Chshnia, J. Zulmuqim. Zalnur, 2023).

Salah satu kebijakan paling penting Abu Ja'far al-Mansur dalam bidang pendidikan adalah pendirian kota Baghdad sebagai ibu kota baru kekhalifahan pada tahun 762 M. Kota ini tidak hanya dirancang sebagai pusat pemerintahan dan militer, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dalam waktu singkat, Baghdad berkembang menjadi tempat berkumpulnya para ulama, ilmuwan, dan cendekiawan dari berbagai penjuru dunia Islam. Al-Mansur secara aktif menarik para ahli dari berbagai bidang ke kota ini dengan menyediakan dukungan dan fasilitas bagi mereka, baik dalam bentuk tempat tinggal, perlindungan politik, maupun insentif ekonomi (Naimah, 2025).

Al-Mansur juga mendorong penerjemahan karya-karya ilmiah dari luar dunia Islam ke dalam bahasa Arab. Ia mengirim utusan ke Kekaisaran Byzantium untuk mendapatkan buku-buku Yunani klasik dalam bidang astronomi, kedokteran, matematika, dan filsafat. Beberapa karya penting Aristoteles, Galen, dan Ptolemeus mulai diterjemahkan pada masa ini, dan walaupun puncak gerakan penerjemahan baru terjadi pada masa al-Ma'mun, pondasi awalnya diletakkan oleh al-Mansur. Salah satu contoh konkret adalah penerjemahan kitab astronomi India *Siddhanta*, yang dikenal dalam versi Arab sebagai *Sindhind* (Mahroes, 2015).

Dalam bidang pendidikan agama, al-Mansur memberikan perhatian besar pada ilmu-ilmu keislaman seperti fikih, tafsir, hadits, dan kalam. Ia mendukung para ulama untuk menulis dan mengajarkan ilmu-ilmu ini secara sistematis. Pada masa ini, kegiatan diskusi keagamaan mulai terstruktur dan berkembang dalam bentuk halaqah (lingkaran ilmu) di masjid-masjid besar Baghdad dan kota-kota lainnya. Al-Mansur sendiri dikenal sering berdiskusi dengan para ulama dan sangat menghormati mereka, selama mereka tidak dianggap mengganggu stabilitas politik (Kawakib, 2014).

Al-Mansur juga mulai menerapkan kebijakan administratif yang mendukung pembiayaan pendidikan dan kegiatan ilmiah. Meskipun belum ada lembaga formal seperti universitas, pemerintahannya mendukung pembentukan perpustakaan dan penyediaan buku-buku bagi kalangan terpelajar (Fikri & Mahbubi, 2021). Ia menyadari bahwa penyebaran ilmu tidak akan berjalan tanpa adanya akses terhadap literatur dan sarana belajar. Beberapa sejarawan mencatat bahwa ia memulai pembentukan cikal bakal perpustakaan Baitul Hikmah (House of Wisdom), yang kemudian berkembang pada masa al-Ma'mun.

Dalam konteks sosial, kebijakan Abu Ja'far al-Mansur membuka peluang lebih luas bagi kaum mawali (non-Arab yang memeluk Islam) untuk menempuh pendidikan dan berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah. Fenomena ini berbeda dengan masa Umayyah yang cenderung eksklusif terhadap kaum Arab. Dengan memberikan kesempatan kepada berbagai kelompok etnis, al-Mansur menciptakan suasana inklusif yang mendorong pertumbuhan keilmuan lebih dinamis dan beragam. Banyak ilmuwan Persia dan non-Arab lainnya yang muncul sebagai tokoh penting pada masa ini dan sesudahnya (Amiruddin Dardiri et al., 2023).

Di bidang filsafat dan ilmu logika, meskipun sempat menuai kontroversi dari kalangan konservatif, al-Mansur tetap memberi ruang bagi diskusi rasional dalam lingkup terbatas. Ia mendukung perkembangan ilmu kalam (teologi rasional) sebagai cara mempertahankan ajaran Islam dari serangan ideologis, khususnya dari kelompok *zindiq* (pengingkara agama) dan pemikiran asing. Diskursus filsafat belum sepenuhnya bebas pada masa ini, namun sudah mulai tumbuh sebagai bagian dari lingkungan keilmuan istana dan elit intelektual Abbasiyah (Chshnia, J. Zulmuqim. Zalnur, 2023).

Kebijakan al-Mansur juga terlihat dalam penunjukan pejabat dan birokrat berdasarkan kapasitas intelektual, bukan hanya garis keturunan atau status sosial. Fenomena ini menciptakan insentif besar bagi masyarakat untuk mengejar pendidikan, karena menjadi terdidik berarti mendapatkan peluang dalam struktur pemerintahan. Ia memperkenalkan sistem meritokrasi terbatas yang memberikan tempat bagi para penulis, akuntan, dokter, dan sarjana dalam pemerintahan. Maka, pendidikan menjadi sarana mobilitas sosial bagi banyak kalangan, terutama di kota-kota besar (M. Ikhwan, 2022).

Di tengah dukungan terhadap ilmu pengetahuan, al-Mansur tetap berhati-hati terhadap potensi ancaman dari kaum intelektual atau ulama yang kritis terhadap kekuasaan. Ia membatasi aktivitas keilmuan yang dianggap subversif atau berpotensi mengganggu stabilitas kekhalifahan. Meskipun pendidikan tumbuh pesat, tetap ada unsur kontrol politik dalam kebijakan ilmu pengetahuan. Ia sangat selektif dalam mendukung ilmuwan, hanya memberikan perlindungan kepada mereka yang dinilai sejalan dengan stabilitas dan visi negara (M. Ikhwan, 2022).

Kebijakan Abu Ja'far al-Mansur dalam mendukung pendidikan menjadi fondasi awal bagi kemajuan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam. Ia membangun infrastruktur kota yang mendukung pertumbuhan intelektual, memperluas akses terhadap karya ilmiah dunia, mendukung para ulama dan penerjemah, serta menciptakan suasana sosial yang relatif terbuka untuk kegiatan ilmiah. Meskipun tidak sepenuhnya bebas dari kontrol politik, masa pemerintahannya merupakan titik awal penting yang menjadikan Baghdad dan dunia Islam sebagai pusat pembelajaran dunia selama beberapa abad setelahnya (Nunzairina, 2020).

4. Lembaga Pendidikan Pada Masa Abu Ja'far al-Mansur

Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur (754–775 M), pendidikan belum berbentuk seperti institusi formal yang terorganisir sebagaimana universitas atau madrasah pada masa sekarang. Namun, embrio sistem pendidikan Islam mulai menunjukkan perkembangan yang sangat penting dan terstruktur, meskipun masih bersifat tradisional dan informal. Dukungan al-Mansur terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan penyebaran pendidikan menjadikan masa pemerintahannya sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah intelektual Islam, terutama karena pengaruh kebijakan-kebijakan awal yang kelak menjadi dasar berkembangnya peradaban ilmiah Islam di era keemasan (Nunzairina, 2020).

Salah satu lembaga pendidikan yang memiliki peran besar pada masa itu adalah masjid. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai pusat kegiatan ilmiah. Di dalam masjid, para ulama mengajar berbagai disiplin ilmu agama seperti fikih, tafsir, hadits, dan ilmu kalam (Ifendi, 2020a). Proses belajar berlangsung dalam bentuk halaqah, yaitu lingkaran belajar di mana seorang guru duduk di tengah dan murid-murid mengelilinginya untuk mendengarkan, mencatat, dan bertanya. Sistem halaqah ini menciptakan suasana

pembelajaran yang dinamis, terbuka, dan langsung, memungkinkan murid untuk berinteraksi intensif dengan gurunya. Halaqah juga berlangsung di tempat-tempat lain, seperti rumah para ulama atau majelis-majelis ilmiah yang diselenggarakan secara rutin (Rafiq, 2022).

Dalam konteks pemerintahan, Abu Ja'far al-Mansur memanfaatkan istananya sebagai pusat intelektual. Ia mengundang sejumlah ulama, dokter, astronom, penerjemah, dan ahli matematika untuk berdiskusi dan berdialog dalam majelis-majelis yang dipimpinnya sendiri. Majelis istana ini menjadi cikal bakal terbentuknya pusat-pusat pembelajaran dan diskusi intelektual yang lebih formal di kemudian hari. Diskusi yang berlangsung tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga meluas ke ilmu-ilmu asing seperti kedokteran dan filsafat Yunani. Al-Mansur dikenal sebagai khalifah yang mencintai ilmu dan menghargai pemikiran rasional, selama tidak bertentangan dengan stabilitas kekuasaan dan nilai-nilai Islam yang ia pegang (Kusumastuti et al., 2025).

Salah satu pencapaian penting di masa al-Mansur adalah dimulainya kegiatan penerjemahan karya-karya ilmiah dari luar dunia Islam ke dalam bahasa Arab. Meskipun pusat penerjemahan besar seperti Baitul Hikmah baru berkembang pesat di masa al-Ma'mun, namun bibitnya telah disemai oleh al-Mansur. Ia mendatangkan naskah-naskah ilmiah dari India, Persia, dan Bizantium, lalu memerintahkan penerjemah untuk mengalihbahasakannya. Salah satu karya penting yang diterjemahkan pada masa itu adalah teks astronomi India berjudul *Siddhanta*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi *Sindhind*. Tindakan ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mengkaji ilmu agama, tetapi juga terbuka terhadap pengetahuan dunia luar (Maryamah, 2015).

Selain masjid dan istana, rumah-rumah para ulama juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan semi-formal. Para ulama besar membuka rumah mereka bagi para murid yang ingin belajar lebih dalam tentang berbagai cabang ilmu. Rumah para cendekiawan ini menjadi semacam tempat belajar privat namun terbuka, di mana manuskrip ditulis, kitab disalin, dan diskusi mendalam dilakukan. Aktivitas di rumah para ulama ini sangat penting dalam mentransmisikan ilmu pengetahuan secara intensif dari satu generasi ke generasi berikutnya (Sulaiman, 2021).

Untuk jenjang pendidikan dasar, keberadaan kuttab atau maktab menjadi sangat penting. Kuttab adalah lembaga pendidikan awal yang mengajarkan anak-anak dasar-dasar membaca, menulis, dan menghafal Al-Qur'an (Ifendi, 2021a). Biasanya kuttab dikelola oleh seorang guru yang mengajarkan anak-anak di rumahnya atau di tempat sederhana di lingkungan masjid. Pendidikan di kuttab menjadi pondasi penting bagi perkembangan literasi masyarakat Muslim sejak usia dini. Meskipun kurikulumnya sederhana, kuttab memegang peran utama dalam memperkenalkan pendidikan formal, terutama bagi anak-anak berkembang dengan pesat (Fatmala, 2025).

Selain menyediakan tempat belajar, pemerintah Abbasiyah juga mulai memberikan dukungan logistik dan fasilitas kepada kalangan intelektual. Para ulama dan penerjemah yang bekerja untuk istana atau yang memiliki reputasi keilmuan sering kali diberikan penghormatan, perlindungan, bahkan insentif ekonomi. Bentuk dukungan seperti ini menjadi landasan penting untuk membangun kultur intelektual yang akan semakin berkembang pesat di masa mendatang. Pemerintahan al-Mansur memperlihatkan bahwa kekuasaan negara dapat berperan aktif dalam memajukan pendidikan, meski tetap dengan pengawasan dan kontrol politik yang ketat (Gutas, 1998).

Meski belum berbentuk madrasah, sistem pendidikan yang mulai berkembang pada masa Abu Ja'far al-Mansur sudah menunjukkan karakter khas dunia Islam: pendidikan terbuka, berbasis pada keilmuan agama, dan diselenggarakan oleh komunitas, bukan hanya negara. Fenomena ini mencerminkan perpaduan antara ilmu agama dan ilmu rasional dalam satu ekosistem pendidikan yang holistic, yang menjadi tanda keterbukaan terhadap kebudayaan dan pemikiran asing (Surono & Ifendi, 2021). Tradisi pendidikan seperti ini memungkinkan

masyarakat Muslim untuk mengembangkan pengetahuan tanpa terlepas dari nilai-nilai keagamaan yang menjadi dasar peradaban mereka (Chshnia, J. Zulmuqim. Zalnur, 2023).

Walaupun lembaga-lembaga pendidikan pada masa Abu Ja'far al-Mansur belum berbentuk institusi formal seperti universitas atau madrasah, peranannya sangat besar dalam membentuk budaya keilmuan Islam. Masjid, halaqah, majelis istana, rumah ulama, perpustakaan awal, dan kuttab adalah wadah-wadah yang memungkinkan ilmu pengetahuan tumbuh dan menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam. Semua ini menjadi fondasi bagi kemunculan lembaga-lembaga pendidikan formal besar di kemudian hari, termasuk madrasah dan Baitul Hikmah, yang akan menjadikan Baghdad sebagai mercusuar ilmu pengetahuan dunia (Kuntowijoyo, 2008).

Lembaga-lembaga pendidikan pada masa Abu Ja'far al-Mansur berkembang dalam bentuk yang sederhana namun peran dan fungsinya sangat penting. Dengan kebijakan yang mendukung kegiatan ilmiah, perhatian pada penerjemahan ilmu asing, serta penghormatan terhadap ulama dan cendekiawan, al-Mansur telah membuka jalan menuju era kejayaan intelektual Islam. Meskipun sistemnya belum sepenuhnya terorganisir secara formal, semangat keilmuan dan struktur dasar yang dibangun pada masa itu menjadi fondasi penting bagi sistem pendidikan Islam yang berkembang megah pada abad-abad berikutnya (Chshnia, J. Zulmuqim. Zalnur, 2023).

KESIMPULAN

Artikel ini memaparkan peran sentral Abu Ja'far al-Mansur dalam membentuk arah perkembangan pendidikan dan keilmuan Islam pada masa awal Dinasti Abbasiyah. Sosoknya tidak hanya dikenal karena strategi politiknya yang tegas, tetapi juga karena keberpihakannya terhadap ilmu pengetahuan. Dengan mendirikan kota Baghdad, ia membuka ruang baru bagi lahirnya pusat kebudayaan dan intelektual yang berpengaruh di dunia Islam. Perhatiannya terhadap kegiatan penerjemahan dan penyebaran ilmu dari berbagai peradaban menjadi bukti nyata dari komitmennya membangun peradaban berbasis ilmu.

Melalui kekuasaannya, ia memperkuat lembaga-lembaga pembelajaran tradisional dan menciptakan iklim meritokrasi yang mendorong masyarakat untuk menuntut ilmu. Kebijakan-kebijakan tersebut secara tidak langsung membentuk fondasi bagi kemunculan institusi pendidikan besar di masa selanjutnya. Penulisan artikel ini hadir sebagai upaya menelusuri jejak intelektual dan kebijakan Abu Ja'far al-Mansur yang berkontribusi besar terhadap wajah pendidikan Islam klasik, sekaligus untuk menunjukkan bagaimana integrasi kekuasaan dan ilmu bisa membentuk peradaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Choirul Rafiq. (2017). *SEJARAH ISLAM PERIODE KLASIK*. 11(1), 1–14.
- Amiruddin Dardiri, M., Waluyo, W., & Aquil, A. (2023). Kondisi Sosial-Politik Dinasti Bani Abbasiyah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 24(1), 69–82. <https://doi.org/10.36769/asy.v24i1.318>
- Andy Riski Pratama, Salmi Wati, Rahmat Hidayat Hasan, Wilda Irsyad, & Iswandi Iswandi. (2023). Bayt Al-Hikmah: Pusat Kebijaksanaan dan Warisan Ilmu Pengetahuan Islam dalam Peradaban Abad Pertengahan. *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*, 2(2), 253–266. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v2i2.2122>
- Chshnia, J. Zulmuqim. Zalnur, M. (2023). Perkembangan Pendidikan Islam Pada Masa Dinasti Abbasiyah. *Journal Islamic Education*, 1(4), 856–867.
- Dari, S. W., & Roza, E. (2023). *Arsitektur Kota Bagdad Pada Khalifah Abu Ja'Far Al - Manshur*. 12(1250 M), 165–173.
- Daulay, H. P., Dahlan, Z., & Putri, Y. A. (2021). Peradaban dan Pemikiran Islam pada Masa Bani

- Abbasiyah Islamic Civilization and Thought in the Abbasid Period. *Edu Society*, 1(2), 228–244.
- Faiz Fikri Al Fahmi, Annisa'ul Fadillah, Retno Pujiastuti, Ahmad Pauji, M. P. P. (2024). *SEJARAH KEEMASAN ISLAM: DINASTI ABBASIYAH DAN KONTRIBUSINYA*. 29–33.
- Fatmala, K. (2025). *Sejarah Perkembangan Perpustakaan Bayt Al-Hikmah Pada Masa Dinasti Abbasiyyah*. 8(5).
- Fikri, S., & Mahbubi, H. A. (2021). Historis, Kemajuan Dan Pendidikan Dinasti Abbasiyah. *Tarbawi*, 9(02), 67–75.
- Gottschalk, L. (1985). *Mengerti Sejarah (Understanding History)*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Gutas, D. (1998). *GREEK THOUGHT, ARABIC CULTURE The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early 'Abbasid Society (2nd/4th/8th-10th centuries)*.
- Harimurti, S. M. (2015). Seni Pada Masa Pemerintahan Dinasti Abbasiyah. *Jurnal Kajian Seni*, 01(02), 194–204.
- Hasibuan, N. H., Dewi, E., & Maksum, A. (2022). *ISLAMIC EDUCATION AND SOCIO-POLITICAL CONDITIONS OF THE BANI ABBASIYAH TIME*. 454–463.
- Ibrahim, A. (2021). Kota Baghdad Sebagai Central Peradaban Islam. *Lentera*, 3(1), 43–54.
- Ichsan, Y., Hanafiah, Y., Fadhlurrahman, F., & Okfia, S. (2023). The Abbasid State's Contribution to Education: History, Policy, and Development of Islamic Educational Institutions. *At-Taqaddum*, 15(2), 83–96. <https://doi.org/10.21580/at.v15i2.16448>
- Ifendi, M. (2020a). Dinasti Abbasiyah : Studi Analisis Lembaga Pendidikan Islam. *Fenomena*, 12(2), 139–160.
- Ifendi, M. (2020b). Masa Pembinaan Pendidikan Islam : Telaah Kritis Pendidikan Rasulullah SAW Pada Periode Makkah. *Al-Rabwah: Jurnal Ilmu Pendidikan*, XIV(1), 58–74.
- Ifendi, M. (2021a). Kuttab Dalam Lintasan Sejarah : Dari Masa Pembinaan Hingga Kejayaan Pendidikan Islam (570 M-1258 M). *At-Ta'Dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 13(1), 27. <https://doi.org/10.47498/tadib.v13i01.511>
- Ifendi, M. (2021b). Pendidikan Islam Rasulullah Saw Periode Madinah : Strategi, Materi Dan Lembaga Pendidikan. *Al-Rabwah: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 15(01). <http://jurnal.staiskutim.ac.id/index.php/namajurnal>
- Jahra, F. Al, Khairani, S., & Ifendi, M. (2025). *Masa Keemasan Intelektual Islam : Studi Historis Pendidikan Islam pada Era Khalifah Al- Ma' mun*. 2.
- Juli, N., Hastuti, S., Rahmatunnisa, H., Lubis, A. F., & Sujana, M. (2025). *Masa Keemasan pada Seni dan Arsitektur Masa Daulah Abbasiyah masa kepemimpinan Abu Ja 'far Al-Manshur . Bangunan stana kekhalfahan pada masa itu*. 2.
- Kawakib, N. (2014). Politik Pendidikan Islam Pada Masa Kejayaan Dinasti Abbasiyah: Politik Ketenagaan. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.18860/jpai.v1i1.3357>
- Kennedy, H. (2015). The Prophet and the Age of the Caliphates. In *The Prophet and the Age of the Caliphates*. <https://doi.org/10.4324/9781315673516>
- Kuntowijoyo, P. I. S. (2008). *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kusumastuti, D. A., Khobir, A., Islam, U., Abdurrahman, N. K. H., & Pekalongan, W. (2025). *Baitul Hikmah Pusat Keemasan Ilmu Pengetahuan Dinasti Abbasiyah*.
- M. Abdul Karim. (2009). *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. 25–34.
- M. Ikhwan. (2022). Memahami Hubungan Hukum, Pendidikan, dan Politik pada Peradaban Bani Abbasiyah. *JSI: Jurnal Sejarah Islam*, 1(02), 113–124. <https://doi.org/10.24090/jsij.v1i2.6777>
- Mahroes, S. (2015). *Sehril Mahroes, Kebangkitan Pendidikan Bani Abbasiyah Perspektif Sejarah Pendidikan Islam, Bandung:Uin Sunan Gunung Djati, 2015. Tarbiya:Jurnal Ilmu Pendidikan*

- Islam*, 1(1), 77–108.
- Maryamah. (2015). Pendidikan Islam Masa Dinasti Abbasiyah. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 47–65.
- Maulidyana, O. (2017). *Abu Jafar Al Mansur*.
- Naimah, R. Y. (2025). *Bani Abbas : Kemajuan Ilmu , Ilmu Kalam , Filsafat , Sains*. 2(1), 1–7.
- Nelly. (2024). Sejarah Pendidikan Islam Mengulas Perjalanan Dari Masa Klasik , Pertengahan Hingga Masa Modern. *Jurnal Pendidikan Islam*, 06(02), 15316–15329.
- Nunzairina, N. (2020). Dinasti Abbasiyah: Kemajuan Peradaban Islam, Pendidikan, dan Kebangkitan Kaum Intelektual. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3(2), 93. <https://doi.org/10.30829/juspi.v3i2.4382>
- Nurchahya, Y., Sugiarto, D., Syah, M. K. T., & Yusuf, M. (2025). Dinamika Dan Pergumulan Islam Di Wilayah Persia Abad 14-16 Masehi. *Iqro Bhisma (IB): Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1), 29–38.
- Pratama, R. A. (2021). Pemikiran Foucault Dan Baron: Kekuasaan Dan Pengetahuan Dalam Pendidikan Dan Bahasa. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(1), 33–43. <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i1.30543>
- Rafiq, M. (2022). STRATEGI DAKWAH PADA MASA DINASTI ABBASIYAH (Pendekatan Komunikasi Politik, Sosial Budaya, Ekonomi Dan Ilmu Pengetahuan). *Hikmah*, 16, 147–164.
- Rizvi, S. F. A., Usmani, A., & Malik, M. A. (2024). The Architectural Legacy of the Abbasid Empire: A Study of Islamic Architecture in Iraq (8th-13th Centuries). *Journal of Social & Organizational Matters*, 3(4), 503–521. <https://doi.org/10.56976/jsom.v3i4.153>
- Rosenthal, F. (1970). Knowledge triumphant: The concept of knowledge in medieval Islam. By Franz Rosenthal. pp. viii, 356. Leiden, EJ Brill, 1970. *Journal of the Royal Asiatic Society*, 103(2), 188–189.
- Sormin, D., Khadijah Nasution, S., Putri Harahap, H., Nopriani Lubis, J., & Sari Batubara, D. (2024). Pendidikan Islam Masa Daulah Abbasiyah. *Thiflun : Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(1), 26. <https://doi.org/10.31604/jpd.v2i1.16836>
- Sulaiman, S. (2021). Sistem Ekonomi Dinasti Abbasiyah (Tinjauan Historis Pada Masa Pemerintahan Khalifah Al-Mansur 95 H-159 H/714 M- 775 M). *Muamalatuna*, 13(1), 84. <https://doi.org/10.37035/mua.v13i1.4653>
- Surono, S., & Ifendi, M. (2021). Pendidikan Islam Klasik : Model Dan Karakteristik. *Thawalib | Jurnal Kependidikan Islam*, 2(2), 79–94. <https://doi.org/10.54150/thawalib.v2i2.23>
- Syuja, A. N. (2020). Mengenal Metode Kualitatif Dan Penelitian Pendidikan Islam. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, December*, 1–11.
- Ummah, M. S. (2020). PERAN PERPUSTAKAAN BAITUL HIKMAH PADA MASA BANI ABBASIYAH. 18(1), 1–14.
- Wijaya, W., Razak, F., & Huda, N. (2025). The Evolution of the Concept of Caliphate in Islamic Political History: Case Studies from Classical to Contemporary Times. *Journal of Noesantara Islamic Studies*, 1(6), 379–391. <https://doi.org/10.70177/jnis.v1i6.1435>
- Yurika Prastika, T. H. (2024). *Socio-Political Conditions of the Abbasid Dynasty and Its Influence on Economic Development*. 10(December).